



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang : 2021 – 2022
Masa Sidang : I
Rapat : Ke – 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.40 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020;
2. Realisasi APBN TA 2021 s.d Bulan Agustus 2021;
3. Membahas RKA K/L TA 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Desa PDT & Transmigrasi beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, Realisasi APBN TA 2021 s.d Bulan Agustus 2021, dan Membahas RKA K/L TA 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini ini di tahun mendatang.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2020 secara detail dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang capaian serapan APBN TA 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KEMENTERIAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1.	Kementerian PUPR (Per 24 Agustus 2021)	49,10%	51,38%
2.	Kementerian Perhubungan (Per 25 Agustus 2021)	50,06%	52,18%
3.	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Per 25 Agustus 2021)	47,15%	48,32%

Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target 2021 dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

4. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran masing-masing Kementerian dalam RAPBN TA 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-634 /MK.02/ 2021 dan 516/ M.PPN/ D.8/ KU.01.01/ 07/ 2021 Tanggal 23 Juli 2021 Perihal Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2022 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO	KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2022	SELISIH
		A	B	(A-B)
1.	Kementerian PUPR	176.680.751.500	100.597.698.915	76.083.052.585
2.	Kementerian Perhubungan	74.560.285.033	32.938.320.363	41.621.964.670
3.	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	10.312.321.329	3.102.388.046	7.209.933.283

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan saran Komisi V DPR RI terkait program pembangunan nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi dari daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2022

KETUA RAPAT,



LASARUS

MENTERI PERHUBUNGAN,

MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI



ABDUL HALIM ISKANDAR

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO